

Pilihan Rasional Indonesia Dalam Keberlanjutan Agenda *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

Yohanes Lucky Tindaon¹, Abdul Syukur², Muhamad Kevin Harris³, Reski Nasvar Azis Madinda⁴, Krisna Rizky Satrio⁵

yohanes.2225@widyatama.ac.id, Abdul.ahmad@widyatama.ac.id, kevin.harris@widyatama.ac.id, reski.nasvar@widyatama.ac.id, satrio.2768@widyatama.ac.id

^{1,2,3,4,5} Program Studi Perdagangan Internasional, Universitas Widyatama

DOI: 10.33197/jpi.v1i1.1086

Abstract

The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement is officially valid for five years, starting on July 1, 2008-2013. There are three main pillars that are the focus of the IJEPA foundation, including trade liberalization, trade facilitation, and capacity building. Apart from the Japanese side, the IJEPA agreement involved many domestic parties. The main actor in this research is the head of the Indonesian government. This research describes the rationalization of the Indonesian government using rational choice theory in the sustainability of the IJEPA agenda. Although the research presentation seems subjective and speculative, this research is fully descriptive using the qualitative research methods from Robert E. Stake, and theoretical arguments based on available information that related to Elizabeth Nunn's rational choice theory. Through rational choice theory, the considerations of the Indonesian government regarding the continuity of the IJEPA agenda are divided into three types of interest; ideological preferences, economic interests, and political interests.

The results of this research explain that the ideological preferences of the Indonesian President in the form of "A million friends, zero enemy" and "Nawa Cita" can influence and also become the base of the policy related to the continuity of the IJEPA agenda. From the side of economic interests, the continuity of the IJEPA agenda is motivated by Indonesia's economic recovery efforts. Meanwhile, on the political interests, the continuity of the IJEPA agenda can be concluded as part of Jokowi's political strategy in increasing public satisfaction regarding his performance in the economic field.

The findings of this research is showing proof that there are political interests from external parties which also influence the considerations of the Indonesian government in the continuity of the IJEPA agenda.

Abstrak

Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang resmi berlaku selama lima tahun, dimulai pada tanggal 1 Juli 2008-2013. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pondasi IJEPA, diantaranya ialah liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan peningkatan kapasitas. Selain dengan pihak Jepang, kesepakatan IJEPA melibatkan banyak pihak dalam negeri. Aktor utama pada riset ini ialah kepala pemerintah Indonesia. Riset ini memaparkan rasionalisasi pemerintah Indonesia menggunakan teori pilihan rasional dalam keberlanjutan agenda IJEPA. Walau pada bagian pemaparan riset terkesan subjektif dan spekulatif, penulisan riset ini sepenuhnya bersifat deskriptif dengan metode riset kualitatif dari Robert E. Stake, serta argumentasi teoretis yang berdasar pada teori pilihan rasional milik Elizabeth Nunn dan informasi yang tersedia. Melalui teori pilihan rasional, pertimbangan pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan agenda IJEPA dibagi menjadi tiga; preferensi ideologi, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

Hasil dari riset ini menjelaskan bahwa preferensi ideologi Presiden Indonesia yang berupa "A million friends, zero enemy" dan 'Nawa Cita' dapat mempengaruhi

Keywords

Economic Partnership, IJEPA, Indonesia, Rational Choice Theory

Corresponding Author

Yohanes Lucky Tindaon
Widyatama University
Jl. Cikutra no 204 A Bandung
West Java, Indonesia 40124.

dan menjadi landasan kebijakan terkait keberlanjutan agenda IJEPA. Selanjutnya, dalam kepentingan ekonomi, keberlanjutan agenda IJEPA dilatarbelakangi oleh upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk kepentingan politik pemerintah Indonesia, keberlanjutan agenda IJEPA merupakan bagian dari strategi politik Jokowi dalam meningkatkan kepuasan publik terkait kemampuan kinerjanya di bidang ekonomi. Temuan riset ini ialah adanya kepentingan politik dari pihak eksternal yang turut mempengaruhi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam keberlanjutan agenda IJEPA.

Pendahuluan

Kombinasi pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi menjadi cerminan karakteristik negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang, tentu memiliki ambisi untuk menjadi negara yang makmur sebagaimana negara-negara maju lainnya. Pada tahun 2011, negara Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan laju inflasi negaranya dengan membuat perencanaan terkait perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi yang dinamakan dengan ‘Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia’ (MP3EI). Perencanaan tersebut dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan target awal pertumbuhan ekonomi riil 6,4 – 7,5%, bersamaan dengan patokan penurunan laju inflasi dari 6,5% hingga menjadi 3,0% pada tahun 2025 (Indonesia Investments, 2014). Namun, adanya perlambatan ekonomi global setelah tahun 2011, memberikan dampak yang masif terhadap harga komoditas. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin jauh dari target yang telah ditetapkan dalam MP3EI. Hingga periode pemerintahan SBY berakhir, Indonesia masih dalam keadaan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia mengakui adanya penurunan permintaan ekspor yang drastis, dan disertai dengan kemerosotan harga komoditas ekspor sepanjang tahun 2013 – 2014 (Diela, 2014).

Permasalahan terkait penurunan permintaan ekspor serta kemerosotan harga komoditas ekspor, pada dasarnya dapat diatasi dengan melakukan kerja sama internasional. Berdasarkan pernyataan Bank Dunia, kerja sama ekonomi internasional dapat mempermudah kedua negara untuk melakukan investasi, perdagangan ekspor impor, menghilangkan hambatan perdagangan berupa tariff dan kuota, sehingga memberikan kompetisi perdagangan yang lebih sehat antar negara yang bersangkutan (The World Bank, 2018). Penting untuk memperhatikan mitra atau negara yang akan menjadi pihak kerja sama. Indonesia sendiri telah melakukan kerja sama ekonomi internasional dengan berbagai negara maju, salah satunya ialah negara Jepang. Pada tahun 2012, Jepang merupakan negara terkaya ke-3 di dunia berdasarkan penilaian Produk Domestik Bruto (The World Bank, 2012). Tak hanya itu, Jepang juga salah satu negara yang dinominasikan sebagai ‘Global Innovator’ oleh Bank Dunia berdasarkan grup pendapatan (Wood, 2021).

Selain memperhatikan berbagai pencapaian negara yang akan menjadi mitra kerja sama, dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain tentunya rekam jejak juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan. Jepang sendiri memiliki latar belakang hubungan yang baik dengan Indonesia sejak tahun 1954, dimana Indonesia membuka kantor perwakilan atau Konsulat Republik Indonesia di wilayah Jepang Barat, tepatnya di kota Kobe

yang pada saat ini telah berpindah ke Osaka (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka Jepang, 2018). Hubungan Indonesia dan Jepang dapat dikatakan cukup erat, terbukti dengan Indonesia menjadi negara penerima program bantuan pembangunan tingkat pemerintah (ODA) terbesar dari Jepang yang sudah berjalan kurang lebih selama 40 tahun (Japan Official Development Assistance to Indonesia, 2011). Dalam hal ekspor, impor, dan investasi, tak perlu diragukan lagi, Jepang menjadi negara mitra dagang terbesar Indonesia. Berikut ialah komoditas-komoditas ekspor Indonesia ke Jepang, posisi pertama ditempati oleh makanan yaitu udang dengan nilai US\$ 5 Miliar pada setiap tahunnya. Adapun ekspor komoditas lain berupa produk batu bara, biji tembaga, kawat berinsulasi, nikel, minyak kelapa sawit, kayu, produk tekstil, getah karet dengan total nilai US\$ 23.6 Miliar (Triton Nusantara Tangguh Corporation, 2019). Disusul dengan investasi langsung swasta pada berbagai sektor yakni listrik, gas dan air, industri, alat angkutan serta transportasi dari Jepang ke Indonesia yang menduduki posisi penting pada tahun 2007, yaitu sebagai investor negara pertama di Indonesia dengan total nilai investasi 11.5% (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2008). Namun seiring terjadinya perlambatan ekonomi yang telah dipaparkan di atas, investasi yang masuk, serta ekspor dan impor di Indonesia mengalami penurunan.

Sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia yang menyarankan negara untuk melakukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional antar negara, Indonesia berupaya mempertahankan keadaan ekonominya dengan melakukan perjanjian kerja sama ekonomi internasional demi menarik kembali investasi asing serta menaikkan pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kompetitif secara global. Oleh karenanya, pada tahun 2003, Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, bertemu dengan Perdana Menteri Joichiro Koizumi untuk menyepakati peninjauan pembentukan kemitraan Indonesia dan Jepang. Berlanjut di tahun 2004, Indonesia dan Jepang menyelesaikan *Joint Study Group* (JSG) untuk membentuk kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Jepang. Pertemuan selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Joichiro Koizumi untuk secara resmi mengumumkan perundingan IJEPA yang dimulai pada tahun 2005. Perundingan IJEPA dilakukan hingga tujuh putaran serta memakan waktu 2 tahun untuk Indonesia dan Jepang sampai pada di titik penyelesaian perundingan.

Kemudian pada tahun 2008, Indonesia dan Jepang mulai menjalin perjanjian kerja sama ekonomi dimana cakupan perjanjian tersebut meliputi perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, penanaman modal (investasi), perdagangan jasa, perpindahan orang perseorangan (tenaga kerja), energi dan sumber daya mineral, kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018). Perjanjian tersebut berjalan selama lima tahun (2008-2013) dan sudah memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah peningkatan kinerja perdagangan barang sebesar 155%, peningkatan investasi Jepang di Indonesia 28.9% (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018). Namun, terlepas dari manfaat-manfaat yang diberikan oleh penerapan perjanjian kerja sama Indonesia dan Jepang, terdapat dampak-dampak lain yang kurang signifikan atau bahkan kurang menguntungkan pihak Indonesia. Salah satu contoh dampak yang justru merugikan Indonesia ialah adanya eksploitasi ikan tuna di wilayah perairan Indonesia oleh Jepang dikarenakan strategi atau perencanaan IJEPA yang kurang matang terkait perdagangan bebas dengan pelestarian

lingkungan, khususnya pengelolaan perikanan (Larasati, 2015). Tak hanya itu, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Struktur Industri, Achdiat Atmawinata, menyatakan bahwa dari 13 sektor industri yang melaksanakan kerja sama ekonomi, hanya 5 sektor yang menunjukkan kemajuan (Mahadi, 2013).

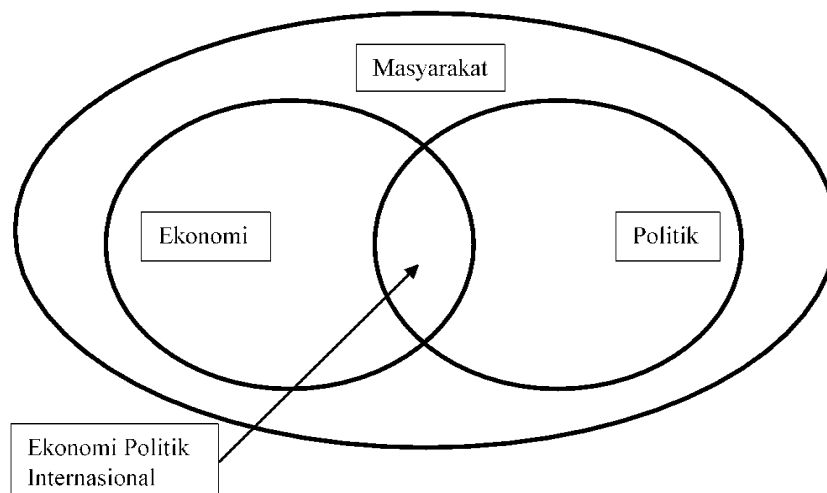
Setelah lima tahun pelaksanaan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang selesai, sesuai dengan pasal 151 yang tertuang dalam IJEPA, Indonesia mulai menginisiasi General Review mengenai perjanjian tersebut pada tahun 2013. Perundingan berjalan cukup alot hingga sempat terhenti pada tahun 2016 dikarenakan adanya isu tarif mengenai produk baja dan otomotif. Adanya pertimbangan pemerintah Indonesia terkait melanjutkan IJEPA cukup menarik perhatian periset, mengingat dampak perjanjian kerja sama ekonomi internasional Indonesia dan Jepang tersebut juga memberikan dampak yang tidak hanya positif, melainkan negatif. Mengapa Indonesia memilih untuk melanjutkan agenda IJEPA? Apa yang menjadi motif atau rasionalisasi pemerintah Indonesia pada tahun 2018 sehingga memutuskan untuk melanjutkan agenda IJEPA?

Kerangka Teoritis

Ekonomi politik internasional merupakan cabang ilmu ekonomi dan ilmu politik yang membahas kedua permasalahan tersebut dalam skala internasional. Berdasarkan buku karya David N. Balaam dan Michael Veseth yang berjudul *“Introduction to International Political Economy”*, pengertian ekonomi politik internasional dapat dipahami melalui tiga hal dasar yaitu internasional, politik dan ekonomi. Internasional, dalam ekonomi politik internasional, ialah isu lintas batas suatu negara yang melibatkan hubungan antar negara. Politik merupakan hal terkait kekuasaan negara dalam membuat keputusan atau kebijakan untuk masyarakat dan negaranya. Politik dianggap sebagai proses kolektif yang tidak terlepas dari kompetisi nilai serta kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai aktor. Aktor politik pada ekonomi politik internasional, tidak hanya terdiri dari partai politik saja, kelompok kepentingan juga merupakan bagian dari aktor politik. Proses politik pada ekonomi politik internasional sangat kompleks, dikarenakan melibatkan berbagai lapisan mulai dari pemerintah negara, hubungan bilateral pemerintah antar negara, organisasi internasional, dan aliansi regional serta kesepakatan-kesepakatan yang ada. Terakhir, ekonomi pada ekonomi politik internasional, merupakan proses yang berkaitan dengan pengalokasian dan pendistribusian suatu sumber daya melalui proses pasar yang terdesentralisasi. Berbeda dengan analisis politik yang sering memiliki fokus pada kekuasaan dan kepentingan negara, analisis ekonomi lebih mengarah kepada isu terkait penghasilan dan kekayaan. Oleh karena itu, ekonomi politik mengkombinasikan kedua hal tersebut untuk memahami dunia melalui sifat dasar masyarakat.

Prinsip pertama pada ekonomi politik internasional ialah pasar dan negara. Ekonomi politik internasional menjadi bidang studi yang menganalisis permasalahan terkait interaksi dinamis antara ‘pasar’ dan ‘negara’ (Gilpin, 1987). Pasar menjadi tempat dimana suatu individu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dan negara menjadi tempat individu tersebut untuk melakukan aksi kolektif berupa mencari keuntungan untuk komunitas yang lebih luas, atau pada umumnya ‘atas dasar masyarakat’. Negara merupakan institusi politik berentitas legal yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintahan yang berdaulat pada suatu negara menjadi

tempat untuk melakukan aksi kolektif dan membuat kebijakan untuk masyarakat pada negaranya. Sedangkan pasar merupakan bidang ekonomi yang didominasi oleh kepentingan individu, yang secara kuat memunculkan kompetisi. Kekuatan pada pasar dapat mempengaruhi kondisi dan motivasi suatu individu. Sebagai contoh, individu yang memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan pribadinya di pasar, secara otomatis akan berkompetisi dan berupaya untuk membuat produknya lebih baik dibandingkan dengan produk-produk lainnya di pasar.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Ekonomi Politik Internasional dalam Masyarakat

Sumber: Balaam & Veseth, 1996, p. 7

Pada gambar 1, dapat terlihat bahwa keberadaan paralel ekonomi dan politik pada masyarakat internasional menciptakan dasar karakter ekonomi politik internasional. Negara sebagai institusi politik dan pasar sebagai alat ekonomi tidak selalu berkonflik, namun keduanya sering kali tumpang tindih satu sama lain yang kemudian menghasilkan ketegangan. Interaksi negara dan pasar merupakan interaksi yang dinamis. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa negara dapat mempengaruhi pasar, dan pasar dapat mempengaruhi negara, bergantung kepada perubahan pola dari kepentingan serta nilai yang terdapat pada ekonomi politik internasional.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan lintas negara melibatkan hubungan politik dari segi ekspor maupun impor yang meliputi perilaku aktor negara dalam memilih dan menciptakan kemakmuran (Bjornskov, 2005). Ketergantungan yang tumbuh antar negara melalui kegiatan ekonomi juga dapat meningkatkan isu politik dan ekonomi internasional. Melalui penjelasan tersebut periset menyimpulkan bahwa ekonomi dan politik dalam hubungan internasional adalah dua hal yang sangat berkaitan atau sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik internasional pada riset ini digunakan untuk memperjelas posisi negara pada lingkup ekonomi politik internasional, serta memberi pemahaman dasar terkait teori yang akan digunakan untuk analisis yaitu teori pilihan rasional.

Kerja Sama Ekonomi Internasional

Menurut Robert O. Keohane, kerja sama internasional adalah sebuah proses dimana terdapat koordinasi atas kebijakan-kebijakan oleh salah satu pihak yang juga diperhatikan pihak lainnya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran masing-masing pihak (Keohane, 1984, p. 362). Isu utama dari kerja sama internasional terletak pada keuntungan bersama yang ingin diperoleh melalui konsepsi kepentingan tindakan kompetitif (Dougherty & Graff, 1986, p. 419). Melalui penjelasan tersebut periset memahami bahwa kerja sama adalah wujud kolaborasi antar negara yang menghasilkan suatu kebijakan untuk memperoleh keuntungan bersama. Pada pelaksanaannya, kerja sama antar aktor negara tentu akan menemui berbagai macam kepentingan-kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi pada masing-masing negara.

Dalam buku yang berjudul *Global Political Economy*, Robert Gilpin berpendapat mulai tahun 1990 terdapat banyak sekali perkembangan yang meningkatkan globalisasi dan juga meningkatkan kompetisi internasional dalam berbagai bidang. Hal tersebut terbukti dengan seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, transportasi dan komunikasi yang sebelumnya tidak berperan banyak pada globalisasi, kini berkontribusi besar pada area perdagangan, investasi dan produksi (Gilpin, 2001). Dari penjelasan tersebut periset melihat bahwa kompetisi internasional yang tercipta dari proses globalisasi tersebut menjadi bagian dari kontributor yang meningkatkan hubungan kerja sama internasional.

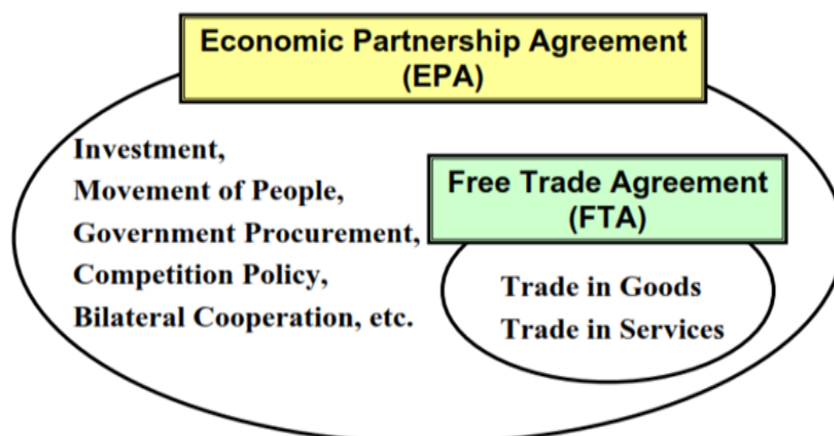
Selain didorong oleh globalisasi, KJ Holsti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kerja sama antar aktor internasional terdapat beberapa alasan lain, diantaranya adalah untuk membantu keadaan perekonomian negara. Pemerintah bekerja sama untuk menangani berbagai permasalahan, namun yang paling umum adalah permasalahan pengurangan biaya. Pengurangan biaya dapat dilakukan melalui praktik aturan *comparative advantage** dengan mengacu kepada kesejahteraan seluruh masyarakat suatu negara. Melalui mekanisme tersebut, suatu negara harus memperhitungkan dengan baik biaya yang akan dikeluarkan atau *cost* dari negara tersebut, baik dari sisi impor serta ekspor barang tertentu (Holsti, 1995, p. 363). Maka dari itu, setiap negara yang melaksanakan kerja sama ekonomi tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungannya saja, melainkan negara tersebut juga harus memperhitungkan biaya pengeluaran.

Kerja sama ekonomi internasional tidak dilakukan dengan sembarang negara. Terdapat banyak variabel yang menentukan suatu negara layak dijadikan sebagai rekan kerja sama. Variabel tersebut diantaranya terdiri dari level perkembangan ekonomi, lingkungan bisnis, kerangka hukum, rezim politik, budaya, tradisi dan sejarah negara tersebut (Grishin, 2017). Fungsi dari banyaknya variabel yang menentukan kelayakan negara dalam melakukan kerja sama ekonomi ialah agar tujuan serta capaian dari kerja sama ekonomi antar negara tersebut optimal.

Kerja sama ekonomi antar negara dapat berbentuk berupa perjanjian atau kesepakatan. Sebelum ada perjanjian kerja sama ekonomi atau *economic partnership agreement* (EPA), terdapat perjanjian pembebasan perdagangan lintas negara yang bisa disebut juga sebagai *Free Trade Area* (FTA). Perjanjian pembebasan perdagangan cakupannya terbatas pada perdagangan barang dan

* Keuntungan komparatif adalah kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada mitra dagangnya. Keuntungan komparatif memberi perusahaan kemampuan untuk menjual barang dan jasa dengan harga lebih rendah daripada pesaingnya dan merealisasikan margin penjualan yang lebih kuat (Ricardo, 1817)

perdagangan jasa. Sedangkan perjanjian kerja sama ekonomi dalam bentuk EPA tentunya lebih komprehensif dan luas, dimana cakupannya meliputi investasi, perpindahan orang perseorangan, pengadaan barang pemerintah, kebijakan persaingan usaha dan bentuk-bentuk kerja sama bilateral lainnya.



Gambar 2 Konsep EPA dan FTA

Sumber: Customs & Tariff Bureau MOF Japan, 2008

Pembaharuan pada model perjanjian kerja sama ekonomi tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian pangsa pasar di luar negeri. Tanpa adanya perjanjian kerja sama ekonomi antar negara, pemerintah dari setiap negara akan mengganggu pasar secara unilateral dalam mengejar hal yang mereka anggap sebagai kepentingannya. Pemerintah dari setiap negara dipastikan akan mengintervensi pasar valuta asing, memberlakukan berbagai pembatasan impor, dan lain-lain. Namun, perjanjian kerja sama ekonomi antar negara juga tidak dapat menjamin hasil yang menguntungkan kedua belah pihak apabila tidak adanya bentuk koordinasi kebijakan antar negara yang berkaitan.

Teori Pilihan Rasional

Berdasarkan buku yang berjudul "Introduction to International Political Economy" karya David N. Balaam dan Michael Veseth, teori pilihan rasional dapat membantu memahami suatu masalah melalui isu dan kegiatan tertentu dalam lingkup *International Political Economy* (IPE) atau ekonomi politik internasional dengan fokus pilihan yang diputuskan berdasarkan kepentingan pribadi para pembuat kebijakan, khususnya pemerintah. Teori ini menyajikan model pemerintahan yang berfokus pada individual serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktor pengambil keputusan. Pejabat publik atau pemerintah sebagai pengambil keputusan memaksimalkan kepentingan pribadi dengan sejumlah batasan.

Pemahaman yang baik terhadap keputusan pemerintah memerlukan pemahaman mendalam terhadap individu yang mengambil keputusan untuk negara. Teori pilihan rasional memeriksa sikap individu-individu menggunakan standar penalaran ekonomi. Teori ini berasumsi bahwa pejabat publik sebagai makhluk rasional akan memilih pilihan yang dapat menguntungkan dirinya. Pilihan-pilihan yang ada dibatasi oleh struktur organisasional pemerintah, hukum negara, batasan pengetahuan dan faktor-faktor lainnya. Dengan adanya pilihan yang disertai batasan-batasan tertentu, pejabat publik atau pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kepentingan

yang terbaik. Sikap individu pengambil keputusan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan politiknya, informasi dan sumber yang diterima, serta perspektif budaya individu pengambil keputusan. Penting untuk diketahui bahwa untuk memahami teori pilihan rasional lebih dalam lagi, tidak hanya pendalaman terkait sikap individu pengambil keputusan pada pemerintah, melainkan dibutuhkan juga adanya pemahaman terkait pasar politik, pasar ekonomi yang tentunya ikut andil sebagai faktor yang mempengaruhi.

Prinsip awal pendekatan pilihan rasional ialah individu memutuskan pilihan sekedar untuk membuat dirinya lebih baik atau lebih jauh lagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Opsi atau pilihan yang ada dibatasi oleh lingkungan, aturan bersikap, nilai-nilai, norma, hukum, dan informasi. Untuk mempermudah gambaran teori pilihan rasional, para ekonom mengaplikasikan teori ini pada produk dan perilaku konsumen di pasar. Pembeli atau konsumen memaksimalkan kebahagiaan mereka dengan membeli barang yang dapat memberikan mereka manfaat yang paling banyak dengan batasan subjek berupa harga barang dan penghasilan pembeli tersebut. Di sisi lain, pihak penjual memilih metode produksi dan mengatur kuantitas harga produksi untuk memaksimalkan profit dengan batasan subjek karakteristik produk, pasar dan kompetitor mereka (Downs, 1957).

Berdasarkan gambaran tersebut, apabila diaplikasikan ke dalam politik, maka negara diposisikan sebagai pasar dimana setiap individu berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Para ekonom berasumsi bahwa setiap pelaku bertindak sesuai dengan pandangan masing-masing. Periset rasa masuk akal untuk mengasumsikan bahwa individu yang bertindak pada suatu negara berupaya untuk mendapatkan keuntungan dalam beberapa cara diantaranya adalah dengan menjadi pelayan atau pejabat publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat publik bisa mendapatkan keuntungan melalui kekuasaan, penghasilan yang diterima dari posisinya, dan dari dampak variasi aturan yang telah berlaku hingga peraturan-peraturan baru yang ditetapkan selama pejabat publik tersebut masih menjabat. Teori pilihan rasional mengidentifikasi kepentingan individu dan memahami bagaimana kepentingan ini mengkondisikan perilaku pejabat publik, yang kemudian mempengaruhi pembuatan kebijakan negara.

Preferensi Ideologi

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa politisi atau pejabat publik memiliki kapabilitas untuk memperoleh keuntungan lebih dari posisinya. Upaya pejabat publik dalam memperoleh keuntungan terdiri dari berbagai cara, beberapa diantaranya ialah dengan membuat kebijakan atau peraturan yang dapat melindungi kepentingan ekonomi dan kepentingan politiknya. Tidak hanya itu, pejabat publik juga mampu memberlakukan aturan yang memenuhi preferensi ideologinya, atau sebaliknya ideologi yang dianut oleh pejabat publik tersebut dapat mempengaruhi peraturan yang ia terapkan. Seorang ahli politik, Converse, mendefinisikan ideologi sebagai konfigurasi ide dan sikap dimana elemen-elemennya terikat bersama dengan beberapa bentuk batasan-batasan (Converse, 1964, p. 207). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa preferensi ideologi pribadi pejabat publik tentu memiliki batasan. Batasan-batasan yang dimaksud ialah preferensi ideologi yang hendak diterapkan harus mengacu pada hukum dan aturan yang diyakini oleh masyarakat sebagai hal baik.

Lebih jauh lagi, Brian Rathbun menyatakan bahwa hampir di setiap sejarah, ideologi yang dimiliki oleh individu sesuai dengan praktik kebijakan yang dibuat (Rathbun, 2012). Walau kurangnya penjelasan sistem yang jelas terkait seberapa jauh preferensi ideologi dapat berpengaruh pada kebijakan, melalui pernyataan Brian Rathbun tersebut periset memahami bahwa preferensi ideologi dapat mempengaruhi para aktor pembuat keputusan untuk menciptakan suatu kebijakan yang menyesuaikan dan berlandaskan pada preferensi ideologinya.

Kepentingan Ekonomi

Teori pilihan rasional membenarkan bahwa pejabat publik sering berupaya untuk menjalankan visi misi mereka dengan dalih 'kepentingan negara'. Kepentingan negara dalam konteks ini dapat berupa peningkatan kekayaan, efisiensi perekonomian secara keseluruhan, diantaranya seperti penstabilan harga, menurunkan pengangguran, distribusi pendapatan yang adil, meningkatkan perkembangan dan produksi negara. Pada skala internasional, kepentingan negara dapat berbentuk sebagai aliansi politik dan perlindungan militer. Pemeliharaan hubungan yang baik dengan negara lain, seperti terjalin dengan aliansi politik dipercaya dapat memberikan manfaat untuk kepentingan negara.

Dalam teori pilihan rasional itu sendiri terdapat kompleksitas dimana adanya persepsi pribadi terkait pilihan politik yang dimotivasi oleh kepentingan masing-masing individu, serta persepsi individu terkait apa yang dianggap sebagai kepentingan negara. Keduanya dapat lebih mudah dipahami apabila terdapat motivasi untuk dapat terpilih kembali sebagai pejabat publik, serta informasi-informasi dari individu terkait. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi rinci terkait individu pada beberapa level kerap tidak tersedia, dan dapat ditafsirkan berbeda-beda.

Lingkungan budaya, pengalaman sehari-hari, dan perkembangan intelektual seorang pejabat publik membentuk keyakinan pribadinya seperti persepsinya tentang kepentingan negara. Hal itu menandakan bahwa sejarah dari pejabat publik tersebut penting untuk diperhatikan. Pemahaman lengkap mengenai perilaku aktor politik secara jelas membutuhkan pemahaman yang dalam mengenai individu terkait, lingkungan pada saat individu tersebut membuat kebijakan, serta peristiwa yang mengarahkan pada kebijakan itu.

Kepentingan Politik

Politisi yang terafiliasi dengan suatu partai politik lalu menjabat sebagai pejabat publik dapat meningkatkan peluang untuk membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan bagi konstituen dan partai politiknya. Umumnya, politisi juga akan memilih individu yang terafiliasi dengan partai politiknya, serta mendukung kebijakan yang dianut oleh partai politik tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh politisi atau pejabat publik tersebut diasumsikan sebagai langkah yang dapat mewakili sekaligus menyenangkan konstituen, tim kampanye dan partai politik (Balaam & Veseth, 1996, pp. 81-83).

Kepentingan politik dalam teori pilihan rasional milik Elizabeth Nunn terlihat lebih fokus pada kepentingan politik di lingkup domestik dibandingkan dengan lingkup eksternal. Keinginan pejabat publik untuk terpilih kembali dalam hal ini menjadi fokus utama kepentingan politik aktor pembuat kebijakan.

Terlepas dari kepentingan negara yang mempengaruhi kebijakan pejabat publik, kepentingan pembuat keputusan—termasuk keinginannya untuk terpilih kembali sebagai pejabat publik—merupakan pengaruh yang paling dominan diantara pengaruh lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dougan dan Munger pada jurnalnya yang berjudul “*The Rationality of Ideology*”, terdapat banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa pejabat publik lebih mendahulukan kepentingannya untuk terpilih kembali ketimbang kepentingan yang lainnya (Dougan & Munger, 1989). Namun, untuk skala yang lebih luas seperti kerja sama ekonomi internasional, biasanya pejabat publik mengambil keputusan tidak hanya didominasi oleh kepentingan pribadinya semata, melainkan lebih ke arah akumulasi dari pengaruh-pengaruh yang ada terutama dari kepentingan ekonomi dan juga kelompok-kelompok kepentingan yang berdampak langsung dengan adanya kebijakan yang akan diputuskan.

Metode

Dalam menggambarkan serta memaparkan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi, penulis menggunakan metode riset kualitatif yang bersifat mikro individual dan memiliki penggambaran isu spesifik milik Robert E. Stake. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder pada riset ini diperoleh melalui studi literatur dokumen resmi dari pemerintah, laporan, arsip, jurnal ilmiah peneliti terdahulu dan wawancara semi terstruktur dengan informan kunci. Untuk memvalidasi data, periset melakukan triangulasi data melalui sumber yang berbeda-beda agar terbukti keakuratan dan kebenaran dari data tersebut. Pada riset ini, teknik analisis data yang dilakukan periset ialah menyortir data, mengkategorikan fokus ke dalam topik dan tema-tema tertentu, kemudian diinterpretasi dan disusun dalam bentuk tulisan, gambar dan tabel.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Kerja Sama Ekonomi Dan Politik Indonesia - Jepang

Pada bagian ini, periset akan memaparkan hubungan kerja sama ekonomi dan politik antara Indonesia dan Jepang sebelum dan sesudah pemberlakuan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kemudian, periset juga akan memaparkan mekanisme pembentukan IJEPA dan lembaga pelaksana terkait, hingga hasil kesepakatan IJEPA.

Hubungan Politik Indonesia dan Jepang Sebelum Pemberlakuan IJEPA

Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik sejak April 1958. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dikelola dengan baik melalui kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh pejabat publik dari masing-masing negara dengan intensitas yang dapat dikatakan cukup sering (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1999). Kunjungan timbal balik yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang berfungsi untuk membangun hubungan kepercayaan individu di antara kedua pimpinan negara tersebut, sekaligus memberikan kesempatan bagi keduanya untuk menjelaskan kebijakan masing-masing yang berhubungan secara langsung dengan saling berhadapan atau *vis-à-vis*.

Berbicara terkait hubungan politik, kepala negara merupakan penentu arah politik luar negeri suatu negara. Pada masa kepemimpinan Soekarno, arah politik luar negeri Indonesia difokuskan kepada pencarian pengakuan kedaulatan dari negara lain untuk kemerdekaan

Indonesia. Sikap Soekarno yang menjunjung tinggi anti kolonialis dan anti imperialis membuat hubungan secara menyeluruh Indonesia dengan negara-negara lain, terutama negara Barat, kurang harmonis (Rachman, 2018). Sedangkan, pada masa kepemimpinan Soeharto, fokus pemerintahan Indonesia terletak pada pembangunan ekonomi yang sebelumnya mengalami keterpurukan. Soeharto membuka akses investor asing untuk menaikkan investasi yang masuk ke Indonesia dengan tujuan menstabilkan keadaan Indonesia. Sikap kooperatif Soeharto tersebut membuat Jepang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia dengan jumlah besar (Rizki M. , 2013). Namun sayangnya, pemasukan modal Jepang ke Indonesia tersebut menciptakan polemik dalam negeri Indonesia yang membawa malapetaka pada tanggal 15 Januari 1974, dimana mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta (Jazimah, 2013). Peristiwa tersebut tidak hanya mencoreng pemerintahan Soeharto saja, melainkan menciptakan kondisi hubungan luar negeri yang juga kurang baik dengan Jepang.

Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, yang kemudian digantikan dengan era reformasi membentuk pemerintahan baru yang demokratis dan tidak otoriter. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, pemimpin merupakan penentu arah fokus politik luar negeri. Hal tersebut menandakan bahwa pergantian kepemimpinan juga dapat mengubah arah kebijakan serta kerja sama luar negeri yang berbeda dari sebelumnya. Pasca pemerintahan Soeharto berakhir, hubungan politik Indonesia dan Jepang berangsur-angsur membaik, bahkan semakin intens pada sekitar tahun 1999-an, dimana Jepang mulai mengirimkan sukarelawan tenaga-tenaga ahli untuk bidang pekerjaan seperti pendidikan keperawatan, teknisi perkapalan, akuakultur, pengelolaan mutu, pengolahan logam, pengelolaan sekolah dan lain-lain (Japan International Cooperation Agency, 2016). Adapun kerja sama yang berhubungan dengan Jepang dilakukan oleh Indonesia melalui Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam implementasi pemanfaatan pengetahuan dari 31 proyek kerja sama Jepang (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, 2015). Keakraban pemerintah Jepang dan Indonesia tergambarkan melalui peningkatan kerja sama Jepang pada bidang tata kelola pemerintahan Indonesia berupa bidang statistik, reformasi kepolisian, reformasi peradilan dan hukum. Jepang menyediakan 79 unit OCR (Optical Character Reader) untuk membantu Indonesia dalam melakukan penghitungan jumlah total penduduk (Japan International Cooperation Agency, 2016). Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan politik Indonesia dan Jepang sebelum pemberlakuan IJEPA relatif stabil.

Hubungan Ekonomi Indonesia dan Jepang Sebelum Pemberlakuan IJEPA

Selain melalui pelaksanaan hubungan politik, Jepang dan Indonesia juga menjalin hubungan ekonomi yang cukup erat dengan adanya program bantuan *Official Development Assistance* atau ODA yang diberikan oleh Jepang kepada negara Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Program ODA tersebut ditujukan untuk mendukung Indonesia dalam pembangunan terkait bantuan aliran dana, bantuan teknologi, serta bantuan darurat korban bencana alam (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.).

Sistem bantuan ODA yang berikan berupa pinjaman yen, bantuan dana hibah, dan kerja sama teknik. Pinjaman Yen merupakan pinjaman dana yang tergolong ringan dan cocok untuk negara berkembang yang membutuhkan pinjaman. Pinjaman tersebut dikategorikan sebagai

pinjaman yang ringan karena pinjaman yen merupakan pinjaman berjangka panjang namun memiliki bunga yang rendah. Selain pinjaman yen, adapun bantuan yang tergolong jauh lebih ringan daripada pinjaman, yaitu bantuan dana hibah. Bantuan dana hibah tidak mewajibkan negara penerima bantuan untuk membayar kembali. Terakhir, kerja sama teknik dari program ODA merupakan kerja sama yang ditujukan untuk memberikan bantuan terkait pembangunan sumber daya manusia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bantuan kerja sama teknik dapat berupa undangan tenaga magang, pengiriman tenaga ahli, relawan, bantuan perlengkapan mesin, peralatan, dan survey-survey terkait pembangunan (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.).

Kerja sama teknik ODA tidak hanya terbatas pada bidang-bidang terkait ketenaga kerjaan saja, melainkan ODA juga memberikan bantuan berupa pembagian Buku Kesehatan Ibu dan Anak seluruh Indonesia sejak tahun 1994. Diharapkan dengan bantuan buku tersebut dapat mendorong peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan anak, peningkatan pengoperasian persalinan yang aman, serta meningkatkan partisipasi vaksinasi pada anak (Japan International Cooperation Agency, 2015).

Negara Indonesia tercatat telah mendapatkan bantuan program ODA dari Jepang dengan total US\$ 3.686.450 juta terhitung mulai dari tahun 2003-2005. Bantuan paling besar terdapat pada bidang energi dan transportasi, masing-masing dengan nilai US\$ 2.043.200 dan US\$ 732.670. Sisanya ada pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perlindungan lingkungan umum, pendidikan, pasok air dan sanitasi, pinjaman program, pemerintah dan masyarakat umum, industri dan pertambangan, perdagangan, kesehatan, informasi dan komunikasi, perbankan dan jasa finansial, pariwisata, serta bisnis dan sektor lain-lainnya. Berdasarkan data pada tahun 2005, Indonesia menjadi negara penerima ODA terbesar dari Jepang (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.).

Interaksi hubungan Indonesia dan Jepang tidak hanya dilakukan melalui program ODA saja. Indonesia dan Jepang juga melakukan interaksi perdagangan dan investasi. Sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, Jepang masih menjadi negara tujuan utama ekspor Indonesia di pasar dunia selain Amerika Serikat dan negara besar lainnya. Jepang adalah negara mitra dagang yang sangat penting bagi Indonesia karena memiliki nilai yang cukup fantastis terkait penghasilan ekspor dan impor. Komoditas-komoditas utama yang diimpor Jepang dari Indonesia ialah minyak, gas alam cair, batu bara, udang, hasil tambang, tekstil beserta produknya, mesin, perlengkapan listrik, dan lain-lain. Sedangkan produk yang diekspor Jepang ke Indonesia ialah mesin-mesin, suku cadang, produk plastik, kimia, baja, suku cadang mobil serta alat transportasi. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, selama tahun 2003-2007, Jepang sebagai negara penerima ekspor Indonesia memberikan kontribusi antara 20,71% hingga 22,30% pada total ekspor Indonesia. Peningkatan ekspor setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 14,89% membuat hubungan Indonesia dan Jepang pada bidang ekonomi semakin erat. Tahun 2004 menjadi titik cerah dalam kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang, dikarenakan pada tahun 2004 terdapat kenaikan ekspor Indonesia ke Jepang dengan total pencapaian 17,34%. Meski pada tahun 2005 peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang tergolong lambat, tahun 2006 menjadi puncak kenaikan kembali ekspor Indonesia ke Jepang dengan nilai kenaikan 20,40%. Ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang pada Januari 2007 mencapai angka terbesar yaitu sebesar US\$ 1,15

Miliar (Badan Pusat Statistik, 2007). Jepang sebagai negara mitra juga melakukan impor barang nonmigas ke Indonesia. Total impor nonmigas Jepang ke Indonesia sebesar US\$ 489,2 Juta (Badan Pusat Statistik, 2007). Dapat terlihat dari total impor ekspor yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam bidang nonmigas, bahwa Indonesia meraup keuntungan lebih banyak dibandingkan impor nonmigas yang masuk ke Indonesia dari negara Jepang.

Untuk bidang investasi, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jepang tetap menjadi negara yang menduduki peringkat pertama sebagai investor terbesar di Indonesia dengan total keseluruhan investasi sebesar 11.5% pada tahun 1967 – 2007. Adapun perusahaan-perusahaan asal Jepang yang didirikan di Indonesia mencapai total 1197 perusahaan dengan hasil produk yang beragam, mulai dari otomotif, makanan, hingga bahan-bahan kimia (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2007). Perusahaan-perusahaan asal Jepang tersebut menciptakan lapangan kerja untuk warga negara Indonesia dan telah memperkerjakan sekitar 41.586 pekerja asal Indonesia (KOMPAS: Ohayo Jepang, 2020).

Selain kegiatan ekspor impor dan investasi, pertukaran nilai valuta asing sebagai alat pembayaran atau transaksi antar negara juga perlu diperhatikan. Berdasarkan sistem moneter internasional terdapat tiga sistem penetapan kurs, diantaranya ialah sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang, dan sistem kurs yang mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan satu atau beberapa mata uang negara tertentu. Negara Indonesia pada tahun 1978 hingga 1997 menganut sistem penetapan kurs mengambang terkendali. Namun, semenjak terjadinya gejolak moneter yang cukup kuat pada tahun 1997, pemerintah Indonesia kemudian mengganti sistem penetapan kurs mengambang terkendali tersebut dengan sistem kurs mengambang murni.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik terkait nilai tukar rupiah yang secara rata-rata mengalami kenaikan pada tahun 2007, apresiasi kenaikan rupiah tersebut disebabkan oleh keberlanjutan deflasi[†] di Jepang yang menimbulkan ekspektasi penundaan kenaikan suku bunga Jepang pada tahun 2007 sebesar 0.50%, tergolong lebih rendah dibanding negara maju lainnya. Penundaan kenaikan suku bunga Jepang yang tergolong rendah kemudian mendorong investor global, termasuk negara Indonesia, untuk meminjam dana dalam Yen Jepang dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih tinggi atau bisa disebut juga sebagai 'Yen *carry trade*' (Badan Pusat Statistik, 2008). Apabila dilihat secara keseluruhan dari data-data yang tertera di atas, peningkatan harga komoditas ekspor Indonesia ke Jepang yang turut mendorong kenaikan kinerja ekspor Indonesia memberikan hasil surplus transaksi antara Jepang dan Indonesia serta meningkatkan nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang di Indonesia pada tahun 2007.

Rekam jejak hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang khususnya pada sektor ekonomi selama tahun 2003-2007 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, secara keseluruhan menggambarkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antar kedua negara.

Hubungan Politik Indonesia dan Jepang Menjelang Pemberlakuan IJEP

[†] Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, deflasi merupakan perubahan nilai mata uang dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar, bertujuan untuk mengendalikan daya beli uang yang nilainya menurun.

Kepemimpinan pemerintah Indonesia pada saat pembentukan IJEPA dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Kebijakan politik luar negeri dalam kendali pemerintahan Megawati lebih memprioritaskan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan negara tetangga, khususnya negara-negara anggota ASEAN (Kumolo, 2004, p. 105).

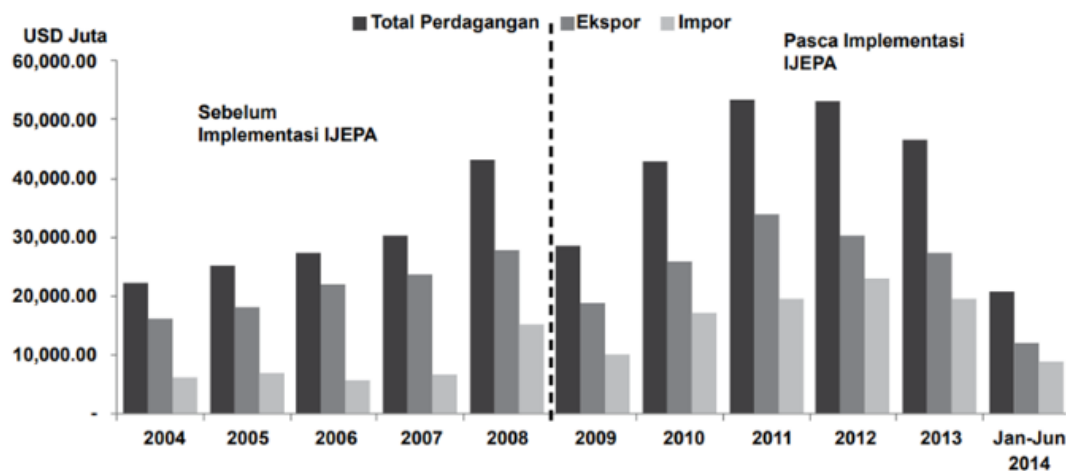
Pada masanya, Megawati aktif melakukan kunjungan-kunjungan langsung ke negara lain untuk melakukan agenda politik luar negeri, khususnya kunjungan ke negara Jepang pada saat peninjauan pembentukan kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang tahun 2003. Namun, kurangnya strategi keseluruhan terkait panduan pembentukan FTA bilateral pada kebijakan perdagangan di bawah pemerintahan Megawati menjadi kelemahan kebijakan perdagangan Indonesia pada masanya (Soesastro & Basri, 2005, p. 15). Setelah masa jabatan Megawati berakhir, pemerintahan Indonesia diambil alih oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif tetap menjadi acuan SBY. Namun, SBY tidak hanya terbatas pada acuan tersebut saja, melainkan ia juga menciptakan karakter tersendiri dalam melakukan politik luar negeri Indonesia, yaitu dengan menciptakan gagasan 'Kebijakan Luar Negeri Segala Arah', serta ideologi '*A million friends, zero Enemy*' yang memiliki arti 'Sejuta kawan tanpa satupun musuh'. Keadaan ekonomi pasca krisis yang terjadi sebelumnya mengharuskan SBY untuk melakukan perbaikan ekonomi dengan menggerakkan kembali roda perekonomian melalui kerja sama ekonomi lintas negara. Upayanya dalam keaktifan politik luar negeri juga diwujudkan dengan menjadikan pembentukan FTA bilateral dengan Jepang sebagai fokus dalam kebijakan ekonominya (Falahi, 2013, p. 229).

Pada masa pemerintahan SBY, tidak terdapat tantangan politik domestik yang mengancam atau mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan kerja sama alias keadaan politik pada masa SBY relatif stabil (Stott, 2008). Pertimbangan untuk memberlakukan kemitraan ekonomi pada pemerintahan SBY melalui pemaparan di atas menggambarkan bagaimana gagasan dan karakteristik politik luar negeri yang dianut oleh Kepala Pemerintah menjadi landasan utama yang mendasari pengambilan kebijakan.

Hubungan Ekonomi Indonesia dan Jepang Setelah Pemberlakuan IJEPA

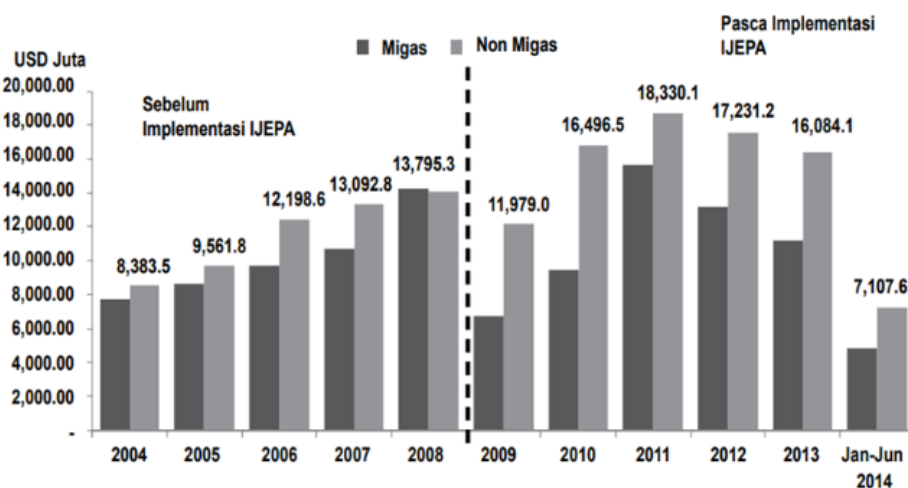
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septika Tri Ardiyanti, anggota Badan Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, total perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang selama lima tahun setelah implementasi IJEPA mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 12.7% setiap tahunnya.



Grafik 1 Kinerja Perdagangan Indonesia dan Jepang, 2009 - Juni 2014
 Sumber: BPS, 2014.

Pada grafik tersebut terlihat bahwa sejak pemberlakuan IJEPA di Indonesia, kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang mengalami peningkatan yang dibarengi dengan imbas dari keadaan krisis global pada tahun 2008. Tahun 2011 dan 2012 merupakan pencapaian tertinggi perdagangan antara Indonesia dan Jepang dari tahun - tahun sebelumnya, sedangkan pada akhir Januari hingga Juni 2014, total perdagangan Indonesia dan Jepang mengalami penurunan sebesar 14.4% atau US\$ 20,6 miliar dibandingkan dengan tahun 2013.

Kenaikan total perdagangan Indonesia ke Jepang selama lima tahun sejak implementasi IJEPA juga rupanya memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang. Peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang sejak pemberlakuan IJEPA tumbuh sebesar 9.5% setiap tahunnya.

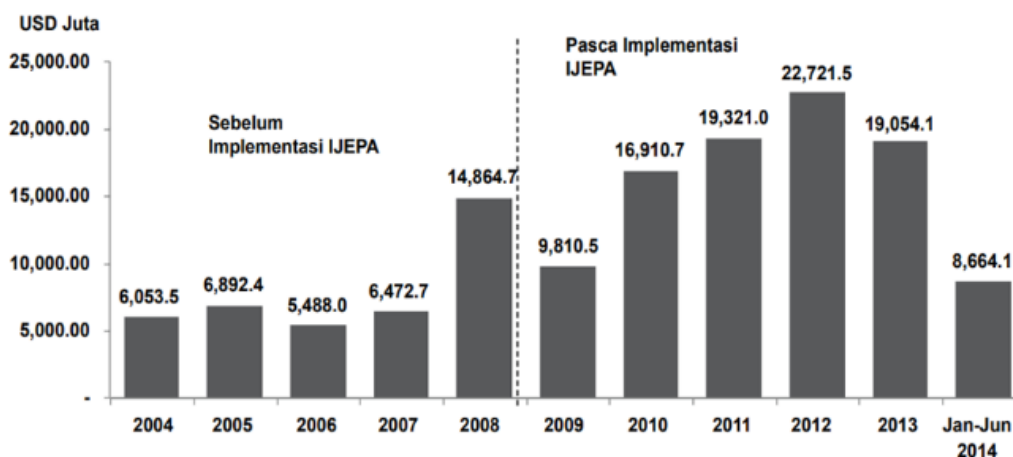


Grafik 2 Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang 2004 - Juni 2014
 Sumber: BPS, 2014.

Tahun pertama setelah pemberlakuan IJEPA yaitu tahun 2009 mengalami penurunan ekspor sebesar 15.9% daripada tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan total ekspor migas dan non migas. Ekspor non migas Indonesia ke Jepang banyaknya terdiri dari ekspor barang-barang tambang seperti batu bara, nikel, karet, kayu dan produk perikanan. Sama halnya seperti

kinerja perdagangan Indonesia ke Jepang, kinerja ekspor juga mendapat posisi puncak nilai total ekspor sekitar tahun 2011 hingga 2013.

Selain kenaikan pada kinerja perdagangan dan kinerja ekspor, kinerja impor Indonesia dari Jepang setelah implementasi IJEPA juga mengalami pertumbuhan yang baik dengan rata-rata nilai pertumbuhan sebesar 17.8% setiap tahunnya. Impor Indonesia dari Jepang mayoritas didominasi oleh impor non migas sebesar 98.8% dari keseluruhan total impor Indonesia dari Jepang.

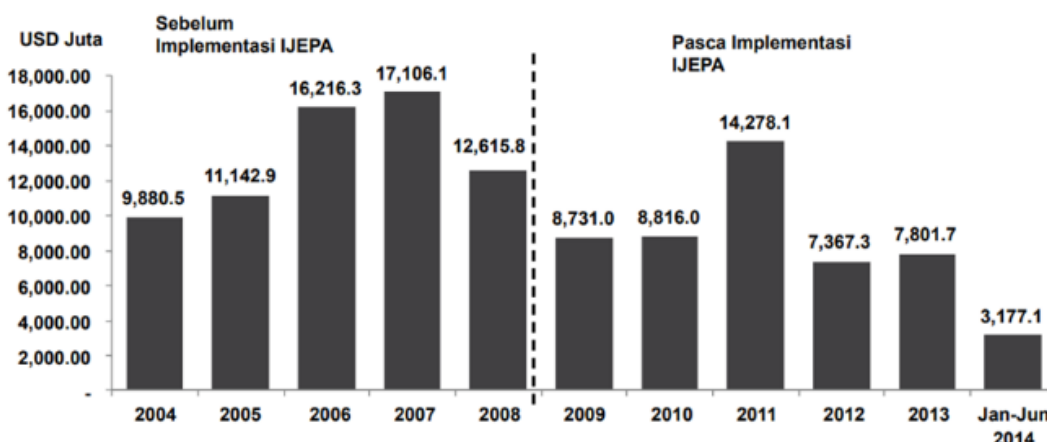


Grafik 3 Kinerja Impor Indonesia dari Jepang 2004 - Juni 2014

Sumber: BPS, 2014.

Pada grafik 3 di atas, terlihat bahwa kinerja impor Indonesia dari Jepang semester 1 tahun 2014 kembali mengalami penurunan. Penurunan tersebut mencapai USD 8,7 Miliar, total 12.2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 67% impor non migas Indonesia dari Jepang yang terdiri dari bahan baku penolong dengan nilai yang mencapai USD 5.8 Miliar.

Berdasarkan total rata-rata nilai kinerja ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan Indonesia dan Jepang sejak tahun 2004 hingga 2014 selalu mendapatkan keuntungan atau surplus.



Grafik 4 Neraca Perdagangan Indonesia dan Jepang 2004 - Juni 2014

Sumber: BPS, 2014.

Namun sayangnya surplus neraca perdagangan yang didapat setelah implementasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia – Jepang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum IJEPA diberlakukan, terkecuali pada tahun 2011 dimana surplus perdagangan mencapai kenaikan dengan total USD 14,3 Miliar. Anomali atau penurunan tersebut diduga merupakan akibat dari krisis ekonomi dunia pada akhir tahun 2008 yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia ke Jepang secara drastis (Setiawan, 2012).

Pemberlakuan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang dipercaya dapat menaikkan ketertarikan investor Jepang ke Indonesia. Dua tahun setelah implementasi IJEPA, terdapat peningkatan *foreign direct investment*[‡] (FDI) dari Jepang ke Indonesia. Pada tahun 2009, investasi Jepang ke Indonesia meningkat dari US\$ 900 Juta hingga US\$ 1.5 Miliar pada tahun 2011. Tidak hanya berhenti disitu, peningkatan investasi Jepang ke Indonesia terus menaik hingga US\$ 2.5 Miliar pada tahun 2012. Selain itu, ketertarikan investor-investor Jepang terhadap investasi di Indonesia juga dapat dilihat melalui antusiasme pada pelaksanaan Seminar Indonesia Investment yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia bersama Japan Mizuho Bank. Total kehadiran pada acara tersebut mencapai 425 partisipan. Berdasarkan paparan di atas terkait hasil pemberlakuan IJEPA, periset dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pemberlakuan IJEPA memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia.

Mekanisme Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang

Sebelum pemberlakuan perjanjian kerja sama ekonomi, terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh hingga mencapai hasil kesepakatan perjanjian. Tahap pertama ialah tahap dimana kedua negara melakukan persiapan sebelum negosiasi, tahap kedua ialah penentuan fokus negosiasi dalam perjanjian antar kedua negara, tahap ketiga merupakan pembentukan delegasi atau tim negosiator untuk pertemuan rutin guna melihat keuntungan serta konsekuensi dari fokus negosiasi yang telah ditentukan sebelumnya, tahap keempat ialah negosiasi, dan yang terakhir ialah pemberlakuan hasil kesepakatan.

Pada tahap pertama dalam pembentukan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang, negara Indonesia melakukan diskusi internal dengan lembaga kementerian atau badan pemerintah lainnya. Diskusi internal pada persiapan awal sebelum negosiasi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang turut berkoordinasi dengan Kementerian lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian, Kementerian Perdagangan juga melakukan koordinasi bersama *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) untuk mendapatkan rekomendasi komoditas-komoditas yang cocok untuk diberlakukan liberalisasi dan yang belum cocok untuk diliberalisasi, serta pengkajian terkait daya saing pasar. Adapun diskusi eksternal yang dilakukan dengan akademisi Jepang untuk mengetahui seberapa besar keuntungan dan manfaat perjanjian kerja sama ekonomi dengan Jepang.

[‡] Foreign Direct Investment adalah investasi asing langsung atau penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing pada lingkup perekonomian suatu negara lain.

Setelah konsultasi internal dan eksternal selesai dilakukan, proposal untuk melakukan perjanjian kerja sama ekonomi dengan Jepang pertama kali diumumkan dalam pertemuan Presiden Megawati dan Perdana Menteri Koizumi pada tanggal 24 Juni 2003. Pertemuan tersebut merupakan *Joint Announcement* yang membahas terkait ruang lingkup *Economic Partnership Agreement* (EPA), konsistensi pembentukan EPA dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO), pertimbangan adanya fleksibilitas untuk area sensitif, serta pembahasan terkait manfaat strategis dan ekonomi untuk kedua negara (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003).

Tahap kedua ialah penentuan fokus negosiasi dari hasil serangkaian pertemuan yang diadakan melalui *Joint Study Group*. Berikut adalah poin-poin yang menjadi topik negosiasi IJEPA (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005):

1. Perdagangan Barang
Perdagangan barang pada kedua negara mitra EPA meliputi:
 - a) Barang-barang Industri
 - b) Perikanan, Pertanian dan Kehutanan
 - c) *Rules of Origin*
2. Prosedur Kepabeanan
3. Hak Kepemilikan Intelektual
4. Kebijakan Persaingan
5. *Mutual Recognition Agreements* (MRA)
6. Investasi dan Perdagangan Jasa
7. Sumber Daya Mineral atau Energi
8. Perpindahan Perseorangan atau *Movement of Natural Persons*
9. Peningkatan Lingkungan Bisnis
10. Pengadaan Pemerintah
11. Kerja Sama

Pihak Indonesia mengajukan permintaan untuk peningkatan pembangunan kapasitas dari pihak Jepang. Pihak Jepang menanggapi keinginan Indonesia dengan menentukan serta menempatkan poin kerja sama pada prioritas.

Hasil Kesepakatan IJEPA

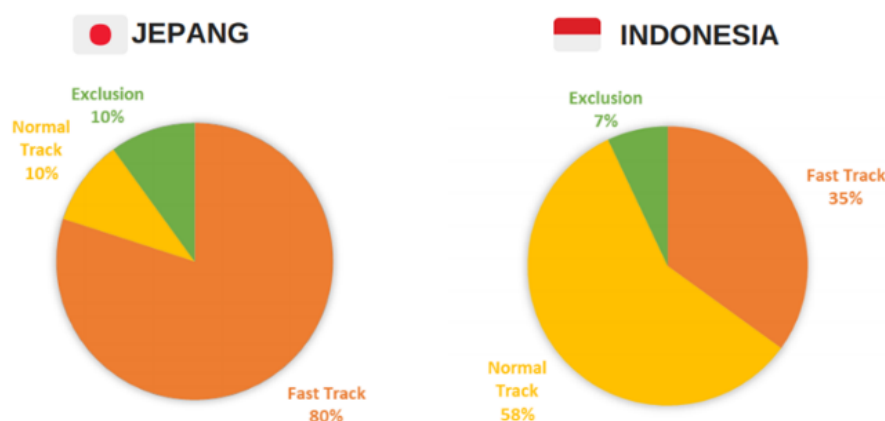
Untuk mencapai hasil kesepakatan IJEPA, dibutuhkan sebanyak tujuh putaran perundingan sebelum akhirnya sampai pada penyelesaian perundingan. Indonesia dan Jepang menandatangani IJEPA pada tanggal 20 Agustus 2007. Pada kesepakatan final yang telah ditandatangani, tertera bahwa fokus kemitraan kerja sama IJEPA terdapat pada bidang perdagangan barang, ketentuan asal barang, penanaman modal atau investasi, pengembangan sumber daya mineral dan energi, prosedur kepabeanan, perlindungan kepemilikan intelektual, transparansi dalam pengadaan pemerintah, perbaikan lingkungan bisnis, perdagangan jasa, perpindahan perseorangan, serta kebijakan persaingan usaha dalam kemitraan ekonomi (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership*, 2007).

IJEPA terdiri dari 154 pasal dengan 15 bagian. Bagian-bagian pada IJEPA tersebut merupakan ketentuan umum terkait perdagangan barang, ketentuan asal barang atau *rules of origin*,

prosedur kepabeanan, penanaman modal atau investasi, perdagangan jasa, perpindahan orang perseorangan (tenaga kerja) atau *movement natural persons*, energi dan sumber daya mineral, kepemilikan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, perbaikan lingkungan bisnis, penyelesaian sengketa, kerja sama, serta ketentuan akhir yang membahas terkait *general review*, amandemen, dan waktu pelaksanaan (Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership, 2007).

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang ini tidak hanya terbatas pada lingkup Free Trade Area (FTA) tradisional yang hanya melakukan pengendalian terkait penurunan atau penghapusan tarif. Lebih luas dari itu, IJEPA terdiri dari tiga pilar yaitu liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas. Melalui tiga pilar ini dapat terlihat bahwa kesepakatan ini tidak hanya mencakup unsur-unsur tradisional FTA, melainkan liberalisasi *foreign direct investment*, perdagangan dan fasilitasi investasi, serta kerja sama ekonomi pada bidang-bidang lain.

Ruang lingkup IJEPA yang pertama ialah perdagangan barang. Pada sektor ini, kedua negara sepakat untuk melakukan penurunan tarif secara komprehensif bagi produk-produk pertanian, kehutanan dan industri. Kesepakatan terkait liberalisasi sektor perdagangan terdapat pada konsensi khusus yang terbagi pada tiga klasifikasi yaitu *fast track*, *normal track*, *exclusion* (pengecualian). Pada jalur cepat, tarif akan diturunkan ke 0% ketika IJEPA resmi berlaku. Sedangkan pada jalur normal atau *normal track*, tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi negara Jepang) atau 15 tahun (bagi negara Indonesia) mulai dari berlakunya IJEPA. Khusus untuk *exclusion* terdapat konsesi khusus untuk produk-produk yang dilindungi demi mencegah adanya dampak negatif terhadap industri domestik.



Grafik 5 Diagram Klasifikasi Penurunan dan Penghapusan Tarif Bea

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018.

Di dalam IJEPA, komitmen perdagangan terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu B, P, Q, R, X. Kategori B merupakan kategori penurunan tarif suatu produk menjadi 0% sesuai dengan kesepakatan. Kategori P merupakan produk yang termasuk sebagai kategori *exclusion*, dimana produk tersebut mendapatkan penurunan bea masuk dengan beberapa catatan yang harus disepakati. Kategori Q ialah kategori untuk produk yang berdasar pada kuota masuk. Kategori X adalah kategori yang menggunakan skema *most favoured nation* (MFN) sehingga tidak dimasukkan kepada skema penurunan tarif (Kementerian Perdagangan RI, 2015, p. 21).

Ruang lingkup kedua IJEPA ialah perdagangan jasa yang mencakupi jasa konstruksi, jasa komunikasi, pendidikan, bisnis, distribusi kesehatan, keuangan, transportasi dan pariwisata. Ketiga, pertukaran informasi dan peningkatan kerja sama berkaitan dengan prosedur bea cukai antar kedua negara. Peningkatan kerja sama yang dimaksud berupa harmonisasi, simplifikasi serta jaminan pada pelaksanaan prosedur bea cukai. Ruang lingkup yang keempat ialah kerja sama pada penciptaan kerangka fasilitasi untuk perluasan bidang investasi. Kemudian yang kelima adalah kerja sama perpindahan orang dimana kedua negara harus memfasilitasi perpindahan orang mulai dari kunjungan bisnis jangka pendek, transfer sumber daya manusia antar perusahaan, pergerakan investor dan profesional, penerimaan tenaga kerja perawat, termasuk perpindahan orang untuk program magang pada bidang industri dan teknik. Selanjutnya, ruang lingkup keenam ialah bidang energi dan mineral. Indonesia dan Jepang sama-sama sepakat untuk menciptakan fasilitasi investasi, jaminan terhadap pasokan energi dan sumber mineral, peningkatan dialog dan kerja sama pada sektor ini. Ruang lingkup ketujuh adalah bidang hak kekayaan intelektual. Kedua negara telah sepakat untuk memberi perlindungan pada hak kekayaan intelektual secara efektif melalui transparansi terhadap sistem perlindungan hak kekayaan intelektual. Ruang lingkup IJEPA yang kedelapan ialah peningkatan pertukaran informasi serta mekanisme dialog terkait pengadaan barang pemerintah. Selanjutnya, terdapat bidang persaingan usaha sebagai ruang lingkup IJEPA yang kesembilan. Pada bidang persaingan usaha, Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk menerapkan hukum yang dapat mendukung kebijakan persaingan usaha. Kesepuluh, terdapat perbaikan lingkungan bisnis yang turut melibatkan pemerintah, kelompok kepentingan seperti kelompok industri, pembisnis, dan pihak yang terkait lainnya dalam perbaikan lingkungan bisnis. Terakhir, kesebelas, ruang lingkup IJEPA difokuskan pada pembangunan kapasitas melalui bidang manufaktur, pertanian, kehutanan, perikanan, investasi dan perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, informasi teknologi, keuangan, pengadaan barang pemerintah dan lingkungan.

Pilihan Rasional Indonesia Dalam Keberlanjutan Agenda *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

Preferensi Ideologi Pemerintah Indonesia dalam Keberlanjutan Agenda IJEPA

Negara sebagai suatu entitas pada lingkup internasional tentu tidak dapat memisahkan diri dari hal yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di bab 2 bagian ekonomi politik internasional. Melalui ekonomi politik internasional, diketahui bahwa negara menjadi tempat individu untuk melakukan aksi kolektif berupa mencari keuntungan atas dasar masyarakatnya. Teori pilihan rasional mempercayai bahwa suatu individu tidak akan terlepas dari motivasi untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Namun dalam upaya pemenuhan kepentingan pribadinya, individu dibatasi oleh batasan-batasan tertentu berupa aturan, norma, dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Kepentingan pribadi suatu individu dapat terdiri dari berbagai hal, salah satunya ialah preferensi ideologi.

Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia sebagai pemegang kendali keputusan tentu memiliki kemampuan untuk memenuhi preferensi ideologinya melalui keputusan yang akan diambil. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemenuhan preferensi ideologi

pemerintah Indonesia kepada keputusan yang akan diambil tidak dapat sembarang, melainkan harus tetap menyesuaikan keinginan masyarakat dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, karakteristik kebijakan luar negeri didominasi oleh preferensi ideologi yang berasal dari SBY selaku kepala negara, seperti “*A million friends, zero enemy*” atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Sejuta kawan tanpa satupun musuh”. Preferensi ideologi tersebut kemudian SBY terapkan dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan gagasan ‘Kebijakan Luar Negeri Segala Arah’ (Utari & Wardhani, 2021). Melalui gambaran tersebut, periset melihat bahwa preferensi ideologi kepala negara dapat diterapkan ke dalam suatu gagasan kebijakan atau visi misi yang dianut oleh negara tersebut. Pada masa kepemimpinan Jokowi-JK tahun 2014-2019, Indonesia memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

1. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut kemudian ditempuh melalui program-program prioritas yang bernama “Nawa Cita”. Berikut adalah poin-poin aksi program prioritas Nawa Cita:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan dan pertahanan negara Tri Matra terpadu berlandaskan kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* berupa program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan secara proporsional berupa pendidikan sejarah pembentukan bangsa yang menanamkan nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan, memperkuat pendidikan kebhinekaan, serta menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

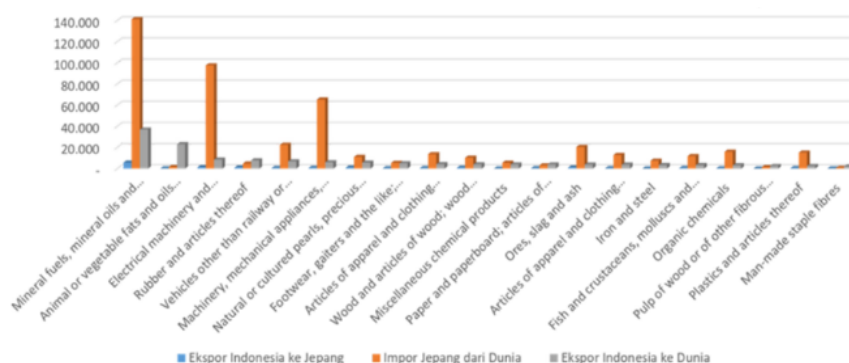
Melalui sembilan program prioritas Nawa Cita tersebut, periset menyoroti satu poin yang berkaitan dengan riset ini, yaitu poin ke-6. Ideologi yang memiliki arti sebagai kumpulan konsep bersistem atau asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, pada poin ke-6 Nawa Cita secara jelas mengarahkan Indonesia untuk bergerak lebih aktif dan produktif lagi di kancah internasional agar tidak tertinggal dengan negara Asia lainnya. Sesuai dengan arah tujuan poin Nawa Cita ke-6, periset melihat bahwa pemberlakuan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia dalam lingkup internasional. Adapun fokus yang telah ditentukan dalam IJEPA, yaitu kebijakan persaingan usaha. Kebijakan tersebut mendukung rakyat Indonesia dalam menjaga daya saing serta mencegah adanya kegiatan antikompetitif antara kedua negara yang dapat menghambat manfaat dari liberalisasi IJEPA (Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership, 2007). Oleh karenanya, preferensi ideologi yang dimiliki pemimpin Indonesia sesuai masa periodenya—SBY dengan “*A million friends, zero enemy*”, Jokowi dengan poin ke-6 Nawa Cita—terbukti menjadi bagian dari pilihan rasional pemerintah Indonesia dalam keberlanjutan agenda IJEPA.

Kepentingan Ekonomi Pemerintah Indonesia dalam Keberlanjutan Agenda IJEPA

Berdasarkan teori pilihan rasional milik Elizabeth Nunn, faktor yang dapat mempengaruhi aktor pengambil keputusan selain preferensi ideologi, ialah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kepentingan ekonomi tentu menjadi sorotan penting dalam pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah atau pejabat publik yang terdiri dari kumpulan individu sebagai aktor pengambil keputusan tidak terlepas dari motivasi untuk memenuhi kepentingan ekonominya. Pemenuhan kepentingan ekonomi suatu pemerintah atau pejabat publik tersebut tentu harus tetap dalam koridor kepentingan negara dan masyarakatnya.

Dalam penelitian ini, kepentingan ekonomi pemerintah Indonesia dapat terlihat mulai dari latar belakang keadaan ekonomi negara Indonesia saat pengambilan keputusan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang diberlakukan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), upaya perbaikan keadaan ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi menjadi hal yang paling diutamakan. Penekanan upaya perbaikan ekonomi tersebut diposisikan pada penggerakan kembali roda ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi makro. Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan oleh SBY adalah melakukan politik luar negeri dalam rangka penguatan kerja sama dengan negara-negara di Asia Timur, salah satunya ialah dengan negara Jepang. Penguatan kerja sama tersebut tentunya memiliki tujuan untuk membantu pemulihan dan perbaikan keadaan ekonomi Indonesia pascakrisis ekonomi dunia dengan dasar hubungan yang saling menguntungkan (Inayati, 2005).

Peluang Indonesia untuk bersaing dan meningkatkan produktivitas di kancah Internasional, khususnya Jepang, dapat terlihat melalui produk-produk Indonesia yang berkemungkinan menguntungkan apabila diekspor ke Jepang di bawah naungan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang. Berikut adalah produk Indonesia yang berpotensi di pasar Jepang:



Grafik 6 Produk Indonesia yang Berpotensi di Pasar Jepang

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2018.

Pada grafik tersebut terdapat 20 produk yang berpotensi menguntungkan apabila Indonesia pasarkan ke Jepang. Produk-produk potensial tersebut terdiri dari bahan bakar mineral, minyak atau lemak nabati, mesin elektrik, peralatan mekanik, suku cadang kendaraan, karet serta produk berbahan karet, mutiara, pelindung atau alas kaki, pakaian busana, kayu dan produk sejenisnya, macam-macam produk bahan kimia, berbagai jenis kertas, timah, besi dan baja, ikan, serat-serat kayu, serat staple buatan, dan bahan kimia organik. Produk-produk Indonesia yang berpotensi tersebut dapat memberikan **keuntungan ekonomi** untuk Indonesia dengan mempermudah akses pasar pada produk-produk yang telah disebutkan di atas dan menjadikan produk potensial sebagai fokus pada perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang. Kemudahan akses pasar yang diberikan dapat meningkatkan *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran) terhadap produk-produk Indonesia (Gilpin, 2001, p. 55).

Agenda penguatan kerja sama dengan Jepang pada akhirnya semakin diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Jepang. Landasan kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang ditujukan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain.

Melalui peningkatan perdagangan bilateral, fasilitasi investasi, serta adanya program bantuan pembangunan kapasitas perusahaan industri Indonesia dari Jepang, perjanjian ini dinilai sangat strategis untuk memperbaiki perekonomian Indonesia (Stott, 2008).

Jelang pertengahan pemberlakuan IJEPA, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi berkepanjangan sekitar tahun 2011-2015 (Indonesia Investments, 2014). Imbas dari hal tersebut sangat masif diantaranya ialah kemerosotan harga komoditas dan permintaan ekspor yang berkurang secara drastis. Melihat adanya kemerosotan harga komoditas serta permintaan ekspor yang berkurang drastis, pergantian kepemimpinan SBY yang dilanjutkan oleh Joko Widodo pada tahun 2014, tidak memberhentikan agenda pembangunan ekonomi Indonesia yang telah dijalankan sebelumnya. Pemerintah Indonesia era Jokowi-JK berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia ke keadaan stabil melalui peninjauan ulang dari kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang.

Peninjauan ulang atau *General Review* IJEPA ialah tahapan lanjutan yang dilakukan setelah implementasi IJEPA selama lima tahun. Tahapan ini menjadi sorotan penting untuk memperlihatkan keuntungan dan kerugian dari pemberlakuan perjanjian kerja sama ekonomi antar Indonesia dan Jepang. Disamping banyaknya keuntungan dari pemberlakuan IJEPA, periset menemukan data yang menunjukkan bahwa pengimplementasian IJEPA tidak memberikan hasil yang menguntungkan pada beberapa sektor, beberapa diantaranya ialah sektor ikan tuna olahan dan bidang MIDEDEC. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shobaruddin, peningkatan ekspor ikan tuna olahan setelah implementasi IJEPA, dimana sektor ikan tuna termasuk ke dalam penghapusan tarif, justru tidak memberikan keuntungan untuk Indonesia (Shobaruddin, 2018). Dari data tersebut, periset memahami bahwa sektor ikan tuna apabila dilihat secara nilai dan volume ekspor pada dasarnya mengalami kenaikan, namun dikarenakan pengimplementasian IJEPA yang memasukkan sektor ikan tuna olahan ke dalam penghapusan tarif, maka kenaikan ekspor ikan tuna olahan tidak memberikan keuntungan yang berarti terhadap Indonesia. Sedangkan pada bidang MIDEDEC, peningkatan kapasitas pembangunan yang seharusnya dilaksanakan pada 13 perusahaan industri, pada kenyataannya yang tercapai hanya 11 perusahaan industri (Hadi, 2014).

Kegagalan pada sektor ikan tuna dan sektor MIDEDEC tersebut memunculkan pertanyaan kepada periset terkait bagaimana sikap pemerintah dalam melihat efektivitas IJEPA yang kurang berhasil di berbagai sektor. Tanggapan mengejutkan datang dari hasil wawancara periset dengan peneliti terdahulu IJEPA dan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menurut kedua narasumber tersebut, kegagalan IJEPA pada beberapa sektor tidak memberhentikan pemerintah Indonesia dalam keberlanjutan agenda IJEPA. Pasalnya kegagalan tersebut justru menjadi pendorong untuk melakukan evaluasi agar Indonesia dan Jepang dapat memaksimalkan kembali kinerjanya sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.

Melalui paparan kumpulan informasi yang periset peroleh baik dari laporan data, hasil penelitian, hingga wawancara langsung, dapat periset simpulkan bahwa kepentingan ekonomi pemerintah Indonesia dalam agenda keberlanjutan IJEPA dilatar belakangi oleh pemulihan keadaan ekonomi akibat krisis tahun 1998 dan perlambatan ekonomi yang dialami pada tahun 2011-2015. Program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah serta adanya produk-

produk potensial yang dimiliki Indonesia, mendukung perluasan kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang. Kegagalan IJEPA pada beberapa sektor tidak memberhentikan upaya pemerintah Indonesia dalam mencari keuntungan yang maksimal dari kerja sama ekonomi dengan Jepang di kemudian hari. Maka dari itu, periset menginterpretasikan bahwa upaya perbaikan keadaan ekonomi Indonesia melalui pemberlakuan IJEPA dan inisiasi peninjauan ulang IJEPA yang diawali oleh pihak Indonesia merupakan bagian dari wujud aksi pemenuhan kepentingan ekonomi Indonesia.

Kepentingan Politik Pemerintah Indonesia dalam Keberlanjutan Agenda IJEPA

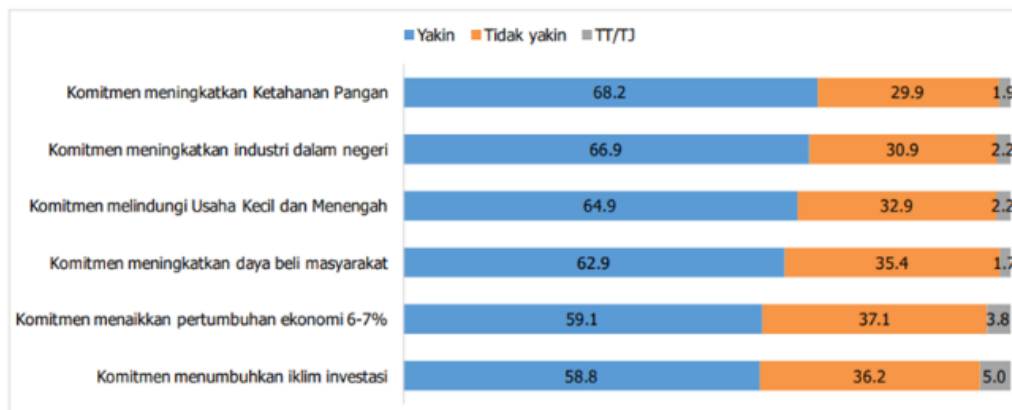
Pada bagian ini, periset akan memaparkan kepentingan politik pemerintah Indonesia dalam keberlanjutan agenda IJEPA dengan membagi bahasan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu kepentingan politik dari lingkup domestik, dan bagian kedua ialah kepentingan politik dari lingkup eksternal.

Kepentingan Politik Lingkup Domestik

Dalam pasar politik, teori pilihan rasional mengidentifikasi perilaku pejabat publik yang mempengaruhi kebijakan negara. Keuntungan yang didapatkan oleh individu dari posisinya sebagai pejabat publik, membuahkan asumsi bahwa pejabat publik akan berupaya untuk mempertahankan posisinya hingga terpilih kembali pada periode selanjutnya. Terdapat tiga elemen krusial yang berperan membantu pejabat publik untuk terpilih kembali. Tiga elemen tersebut ialah konstituen, tim kampanye, dan partai politik. Untuk bisa terpilih kembali, pejabat publik harus bisa ‘menyenangkan’ atau mendapatkan atensi yang baik dari ketiga elemen tersebut.

Pada riset ini, pejabat publik yang periset sorot ialah Presiden Joko Widodo. Kembali terpilih sebagai Presiden pada periode ke-dua, terdapat kesesuaian dengan pernyataan teori pilihan rasional, dimana pejabat publik berupaya untuk mempertahankan jabatannya dengan cara terpilih kembali. Identifikasi perilaku Jokowi akan dilakukan periset melalui pengkaitan langkah atau kebijakan yang Jokowi ambil—khususnya dalam langkah keberlanjutan agenda IJEPA—dengan laporan penelitian dan hasil survei oleh lembaga think tank sebagai penguat data.

Masyarakat sebagai konstituen utama merupakan elemen terpenting dalam politik. Kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan Jokowi melalui keberlanjutan agenda IJEPA dapat dikatakan menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Jokowi. Terlebih Jokowi secara jelas mengatakan kepada publik terkait keinginannya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi ke angka 6%, (Triyono, 2016). Maka segala upaya terkait kenaikan dan perbaikan ekonomi menjadi bagian dari strategi Jokowi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerjanya.



Grafik 7 Hasil Survei CSIS terkait Keyakinan Publik terhadap 2 Tahun Pemerintahan Jokowi dalam Bidang Ekonomi

Sumber: CSIS, 2016.

Hasil survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies terkait Optimisme Publik, Konsolidasi Kekuasaan dan Dinamika Elektoral terhadap 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi di atas menunjukkan optimisme publik yang cukup tinggi. Total publik yang optimis terhadap kinerja pemerintahan Jokowi pada Agustus 2016 dengan total 60.5% sudah merupakan peningkatan dari tahun lalu yang hanya mencapai 50.6%. Khusus pada sektor ekonomi, kepuasan publik mengalami kenaikan 30% (Centre for Strategic and International Studies, 2016). Hasil pemberlakuan IJEPA yang berhasil meningkatkan total ekspor dan impor sebagaimana yang terlampir pada bab 4, berjalan sesuai dengan peningkatan kepuasan publik terhadap kemampuan kinerja Jokowi.

Selain konstituen utama, adapun partai politik dan tim kampanye yang menjadi elemen pembantu dalam pemilihan umum. Koalisi partai politik Jokowi-JK pada pemilu tahun 2014 ialah PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Tingkat elektabilitas Jokowi yang mencapai 41.9% pada saat survei dilakukan serta kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi turut membantu menaikkan perolehan suara publik terhadap partai politik pengusung seperti PDIP, PKB, Hanura (Centre for Strategic and International Studies, 2016). Pada pemilihan presiden tahun 2019, koalisi partai politik lawan di periode sebelumnya, seperti Golkar dan PPP, memutuskan untuk bersatu dengan kubu Jokowi (Rizki, 2018).

Berdasarkan paparan hasil survei di atas, periset menyimpulkan bahwa keberlanjutan agenda IJEPA sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi pada masa pemerintahannya di periode pertama membuahkan hasil yang baik berupa kenaikan kepercayaan publik terhadap kemampuan kinerja Jokowi. Kepercayaan publik tersebut juga berimbas baik kepada partai politik pengusung Jokowi yang turut menarik atensi masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Jokowi tersebut sesuai dengan langkah teori pilihan rasional pada pasar politik dimana pejabat publik berupaya untuk terpilih kembali dengan menyenangkan tiga elemen tersebut melalui kebijakan yang diambilnya.

Kepentingan Politik Lingkup Eksternal

Selain kepentingan politik lingkup domestik yang memiliki andil dalam mempengaruhi keberlanjutan agenda IJEPA, adapun kepentingan politik dari lingkup eksternal yang rupanya tak

kalah penting dalam memberikan pengaruh kepada pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan agenda IJEPA.

Melalui wawancara dengan Ibu Nadya Nabila selaku Diplomat Ahli Pertama, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, periset menyimpulkan bahwa situasi politik internasional memiliki andil yang besar terhadap terciptanya perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Jepang. Perundingan perdagangan multilateral yang tersendat dan tidak adanya kelanjutan di tingkat World Trade Organization menciptakan kebijakan *free trade area* yang ramai di kawasan Asia Timur. *Free trade area* atau perjanjian perdagangan dianggap sebagai jalan keluar bagi negara-negara berkembang untuk melakukan perjanjian perdagangan dengan prosedur yang lebih singkat dibandingkan dengan prosedur perundingan tingkat multilateral di WTO (Hamzah, 2012). Peningkatan perjanjian perdagangan di wilayah Asia memotivasi Indonesia untuk mempertimbangkan *free trade area* sebagai alat untuk meningkatkan perdagangan sekaligus memperbaiki perekonomian Indonesia. Mempertimbangkan dampak yang akan muncul dari kebijakan beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang telah terlebih dahulu melakukan putaran negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi dengan Jepang, memberikan motivasi kepada negara Indonesia untuk membuat kesepakatan perjanjian kerja sama ekonomi dengan Jepang.

Berdasarkan informasi dari narasumber dan data yang periset kumpulkan, riset ini membuahkan temuan bahwa dalam keberlanjutan agenda IJEPA, pemerintah Indonesia **tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik domestiknya**—sebagaimana pandangan teori pilihan rasional yang berfokus hanya pada upaya pejabat publik untuk dapat terpilih kembali dan mempertahankan posisinya di periode selanjutnya—melainkan pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian pada situasi politik internasional. Tersendatnya perundingan perdagangan di level WTO serta pelaksanaan perdagangan bilateral yang mulai aktif di kawasan Asia menjadi bagian dari pertimbangan kepentingan politik eksternal yang mempengaruhi pilihan pemerintah Indonesia dalam keberlanjutan agenda IJEPA.

Kesimpulan

Riset ini telah membahas pilihan rasional Indonesia dalam keberlanjutan agenda *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kerja sama ekonomi internasional antara Indonesia dan Jepang yang telah diberlakukan terdiri dari banyak pihak. Aktor utama pada riset ini ialah kepala pemerintah Indonesia. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat pada perjanjian yaitu Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI, organisasi non-pemerintah, serta asosiasi-asosiasi kelompok kepentingan yang terkait. Melalui teori pilihan rasional, pertimbangan pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan agenda terbagi menjadi tiga; preferensi ideologi, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik. Preferensi Ideologi Presiden Indonesia pada masing-masing masa pemerintahan—SBY dengan “*A million friends, zero enemy*” dan Jokowi dengan Nawa Citanya—dapat mempengaruhi dan menjadi landasan kebijakan terkait keberlanjutan agenda IJEPA. Adapun kepentingan sektor ekonomi dibalik pemberlakuan IJEPA serta inisiasi awal yang muncul dari pihak Indonesia untuk segera melakukan peninjauan ulang pada IJEPA, dilatar belakangi oleh upaya pemerintah Indonesia dalam memulihkan keadaan

ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk kepentingan politik terbagi lagi menjadi dua, kepentingan politik yang berasal dari domestik dan kepentingan politik yang berasal dari eksternal. Kepentingan politik domestik berfokus pada upaya pejabat publik dalam mempertahankan jabatannya, Jokowi menggunakan keberlanjutan agenda IJEPa sebagai bagian dari strategi politik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan kinerjanya di bidang ekonomi. Kepuasan publik tersebut turut berimbas baik pada partai politik pengusung kubu Jokowi. Pemenuhan kepentingan politik Jokowi melalui kebijakan yang ia buat sudah sesuai dengan elemen-elemen yang ada pada teori pilihan rasional.

Riset ini membuahkkan temuan yaitu adanya kepentingan politik dari pihak eksternal yang turut mempengaruhi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam keberlanjutan agenda IJEPa. Kepentingan politik pada teori pilihan rasional milik Elizabeth Nunn lebih banyak menekankan fokus pada upaya seorang individu yang menjadi pejabat publik dalam mempertahankan posisinya melalui kebijakan yang dibuat. Sedangkan pada kenyataannya, pemerintah Indonesia juga menjadikan situasi politik internasional sebagai pertimbangan untuk keberlanjutan agenda IJEPa, khususnya terkait keputusan negara-negara tetangga Indonesia yang telah terlebih dahulu memulai perundingan kerja sama ekonomi dengan Jepang.

Referensi

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2007, Januari). Retrieved from https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_29012007-Jepang_Masih_Minati_Listrik_Siapkan_Investasi_US_600_Juta.pdf
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI. (2015). *Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bagi Kepentingan Nasional*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Nilai Ekspor Indonesia Januari 2007 US\$ 8,35 miliar*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Publikasi Nilai Tukar Valuta Asing*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Balaam, D. N., & Veseth, M. (1996). *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bjornskov, C. (2005). *Basic of International Economics*. New York: Ventus Publishing.
- Centre for Strategic and International Studies. (2016). *2 Tahun Jokowi: Optimisme Publik, Konsolidasi Kekuasaan dan Dinamika Elektoral*. CSIS.
- Converse, P. E. (1964). *The Nature of Belief Systems in Mass Publics*. (D. Apter, Ed.) New York: Free Press.
- Diela, T. (2014, November 20). *BI: Sepanjang 2014 Ekonomi Indonesia Melambat Tetapi...* Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2014/11/20/235805626/BI.Sepanjang.2014.Ekonomi.Indonesia.Melambat.tetapi> KOMPAS.com:
- Dougan, W. R., & Munger, M. C. (1989). The Rationality of Ideology. *The Journal of Law & Economics*, 32, 119-142.
- Dougherty, J. E., & Graff, R. L. (1986). *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Longman.

- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Falahi, Z. (2013). Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty. *Indonesia for Global Justice: Jurnal Global dan Strategis*(2), 227-240.
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Grishin, V. (2017). *U.S.-Russia Economic Relations: Myths and Realities*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Hadi, S. (2014). *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective*. East Asian Policy.
- Hamzah, H. Z. (2012). The Impact of Japan's EPA on Automotive Industry in Malaysia, Thailand, and Indonesia. *JATI: Journal of Southeast Asian Studies*, 17, 23-42.
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics - A Framework for Analysis* (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Homans, G. C. (1961). *Social Behaviour: Its Elementary Forms*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Inayati, R. S. (2005). Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 2(1), 35-49.
- Indonesia Investments. (2014). *Ekonomi Indonesia*. Indonesia Investments.
- Indonesia Investments. (2014). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Indonesia Investments. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei/item306?>
- Japan International Cooperation Agency. (2015). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KLA) Telah Digunakan oleh Lebih dari 80% Ibu di Seluruh Indonesia*. Japan International Cooperation Agency.
- Japan International Cooperation Agency. (2016). *Tenaga Ahli Muda (JOCV: Japan Overseas Cooperation Volunteers)*. Japan International Cooperation Agency.
- Japan Official Development Assistance to Indonesia. (2011, Januari 20). *Half Century of Partnership Official Development Assistance from Japan to Indonesia*. Retrieved from Japan Official Development Assistance to Indonesia: <https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/index.htm>
- Jazimah, I. (2013). Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Jurnal AGASTYA*, 3(1), 9-34. Retrieved from Tirto.id.
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2008, Desember). *Hubungan Bilateral Indonesia - Jepang*. Retrieved from Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: https://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (n.d.). *Bantuan Official Development Assistance Jepang di Indonesia*. Retrieved from Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: <https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018, April 18). *Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Retrieved from Kementerian Perdagangan

- Republik Indonesia: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/jepang>
- Kementerian Perdagangan RI. (2015). *Laporan Akhir Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Retrieved from http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_review_IJEPA_dalam_Perdagangan_Barang.pdf
- Kementerian Perdagangan RI. (2018). *FACT SHEET: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Keohane, R. O. (1986). *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press.
- KOMPAS: Ohayo Jepang. (2020). *Bekerja di Jepang, Berikut Data Pekerja Asing yang Bekerja di Negara Ini*. Kompas.com.
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka Jepang. (2018). *Hubungan Bilateral RI - Jepang*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/osaka/id/pages/hubungan_bilateral/82/etc-menu
- Kumolo, T. (2004). *Megawati Soekarnoputri Presiden Pilihan Rakyat*. Jakarta: Global Publika.
- Larasati, S. D. (2015). Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Studi Kasus: Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna di Wilayah Perairan Indonesia. *Journal of International Relations Undip*, 1(2), 70-78.
- Mahadi, T. (2013, Juni 23). *Kerjasama IJEPA Hanya Berhasil di 5 Sektor*. (H. K. Dewi, Editor) Retrieved from Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/kerjasama-ijepa-hanya-berhasil-di-5-sektor>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1999). *Diplomatic Bluebook 2000*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2003). *Joint Announcement By The Prime Minister of Japan and The President of The Republic of Indonesia on The Possibility of The Economic Partnership Agreement Between Japan and Indonesia*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/pv0306/economy.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2005). *The Preparatory Meeting on Japan-Indonesia Economic Partnership*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/meet0309.html>
- Rachman, Y. (2018). GERAKAN ANTI-KOLONIALISME MENUJU INDONESIA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF SMELSERIAN. *SIMULACRA*, 1(2), 183-202.
- Rathbun, B. (2012). Politics and Paradigm Preferences: The Implicit Ideology of International Relations Scholars. *International Studies Quarterly*, 607-622.
- Rizki, M. (2013). Investasi Asing Jepang di Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1967-1974. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 231-239.
- Rizki, R. (2018). *Partai Pendukung Jokowi Deklarasikan Koalisi Indonesia Kerja*. CNN Indonesia.
- Setiawan, S. (2012). Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17(2).

- Shobaruddin, M. (2018). Indonesian Strategy in Negotiating Tariff Duty of Tuna Commodity under Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). *Asia Pacific Studies*, 6-9.
- Snyder, G. H., & Diesing, P. (1977). *Conflict among Nations: Bargaining, Decision Making and System Structure in International Crisis*. Princeton: Princeton University Press.
- Soesastro, H., & Basri, M. C. (2005). The Political Economy of Trade Policy in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*, 22(1), 3-18.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. New York: The Guilford Press.
- Stott, D. A. (2008). The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals? *The Asia-Pacific Journal*, 6(7), 1-16.
- Stott, D. A. (2008). The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals? *The Asia-Pacific Journal*, 6(7), 1-16.
- The World Bank. (2012, May 21). *The World Bank Data: Japan*. Retrieved from The World Bank: <https://data.worldbank.org/country/japan?view=chart>
- The World Bank. (2018, Desember 13). *December 2018 Indonesia Economic Quarterly: Strengthening Competitiveness*. Retrieved from The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-december-2018>
- Triton Nusantara Tangguh Corporation. (2019, October 16). *Inilah 10+ Komoditi Indonesia yang Biasa Diekspor ke Jepang, Lengkap!* Retrieved from Mister Exportir: <https://misterexportir.com/komoditi-indonesia-yang-biasa-diekspor-ke-jepang/>
- Triyono, A. (2016, November Rabu). *Ingin ekonomi 2018 tumbuh 6%, ini strategi Jokowi*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/ingin-ekonomi-2018-tumbuh-6-ini-strategi-jokowi>
- Utari, S. M., & Wardhani, B. (2021). National Identity and Foreign Policy: Indonesia Million Friends Zero. *Airlangga Conference on International Relations*, 581-587.
- Wood, T. (2021, January 28). *Global Stars: The Most Innovative Countries, Ranked by Income Group*. Retrieved from Visual Capitalist: <https://www.visualcapitalist.com/national-innovation-the-most-innovative-countries-by-income/>